

THE EFFECT OF E-BUDGETING, DISCLOSURE, AND INTERNAL CONTROL ON FINANCIAL MANAGEMENT TRANSPARENCY

Angga Vredi Nugroho¹ Sri Ayem²

¹ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Indonesia

anggavnq@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 19-05-2021

Tgl. Diterima : 10-06-2021

Tersedia Online : 30-09-2021

Keywords:

Transparency, Financial, E-budgeting, Disclosure, Sector Public

ABSTRACT

The research was conducted as an effort to strengthen local government transparency. The sampling technique was purposive sampling. The data source uses primary data. The data collection method uses a questionnaire method. The analysis technique used is regression analysis with a significance level of 5%. The results showed that the implementation of e-budgeting and the disclosure of financial reports had a positive and significant effect on the transparency of financial management and internal control had no positive and significant effect on the transparency of financial management. This research contributes to government officials in demonstrating their role in promoting regional financial transparency.

PENDAHULUAN

Di Indonesia beberapa tahun terakhir, transparansi keuangan masih menjadi pusat perhatian masyarakat. Dengan UU No.14 tahun 2008, perhatian terhadap transparansi semakin berkembang pesat. Penelitian ini penting mengingat banyaknya kasus yang menjerat penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Terletak pada ketidaktransparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di daerah masing-masing. Permasalahan di atas dapat berkurang apabila pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip transparansi. Dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Hal ini biasanya di bicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Sabriani (2020) bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nurhadianto & Khamisah, (2019) menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (*scant or none*) atau tidak cukup transparan. Dika Kurniawan (2019) menunjukkan adanya hubungan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. D. A. D. Nasution & Ramadhan, (2019) menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-budgeting* berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. R. P. Sari et al., (2020) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap transparansi dalam mengelola laporan keuangan daerah. A. P. Nasution & Atika, (2019) menunjukkan bahwa hubungan *e-budgeting* rendah dengan akuntabilitas dan transparansi. Guasmin & Febrianti, (2019) menunjukkan adanya hubungan positif antara penyajian laporan keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menarik karena, pertama temuan riset-riset sebelumnya yang tidak konsisten. Beberapa riset menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan AR et al., (2020); Sabriani (2020) dan Nurhayati (2020). Namun temuan riset lain menyatakan bahwa bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan oleh R. P. Sari et al., (2020). Kedua, organisasi sektor publik di Indonesia pada saat ini masih belum secara keseluruhan mendapatkan predikat nilai baik atas laporan keuangan yang disajikan. Ketiga, Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah saat ini masih banyak ditemukannya permasalahan oleh BPK. Penulis mengacu pada penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Sabriani (2020). Dengan menambahkan satu variabel bebas yaitu implementasi *e-budgeting* dan memodifikasi variabel terikat menjadi transparansi pengelolaan keuangan. Dengan mengubah sampel SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teori keagenan dibangun untuk memahami dan memecahkan masalah

yang muncul saat terdapat ketidaklengkapan informasi ketika prinsipal dan agen melakukan kontrak. Teori keagenan memperkirakan bahwa apabila agen mempunyai keunggulan informasi dibanding dengan prinsipal dengan kepentingan agen dan prinsipal yang berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem*, yaitu agen dapat melakukan sebuah tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan akan merugikan prinsipal. Permasalahan ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agen dan prinsipal (*information asymmetry*) sering terjadi juga pada organisasi sektor publik (Insani, 2017). Teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), teori ini melihat sebuah manajemen sebagai stewards (pelayanan/penerima amanah/ pengelola) yang akan bertindak berdasarkan kesadaran penuh, kearifan serta kebijaksanaan bagi kepentingan umum organisasi. (Pancaningrum, 2019). Penelitian ini menggunakan objek Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena peneliti bertempat tinggal di kawasan daerah tersebut dengan berkontribusi dapat memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat sekitar yang menuntut kejelasan penggunaan anggaran. Dengan mempertimbangkan permintaan dinas terkait yang semula pernah peneliti terima saat masa praktek kerja lapangan sebelumnya.

Pemerintah dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) jika seluruh aktivitasnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini berusaha memberikan bentuk kontribusi

pada pengembangan akuntansi sektor publik pemerintahan daerah dengan menginvestigasi pengaruh *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya dalam memperkuat azas keterbukaan. Azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah yang membuka pemerintahan terhadap kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak ada unsur diskriminatif. Beberapa peneliti berfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Maka disana terdapat keterbatasan studi tentang transparansi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini intens untuk membahas transparansi pengelolaan keuangan organisasi sektor publik. Tujuan dari penelitian ini adalah berkontribusi membantu tercapainya keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintahan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agency

Teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan (Supriyono, 2018).

Teori Stewardship

Teori ini menggambarkan kewajiban pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan adanya kepentingan publik. Dengan cara pemerintah melaksanakan tugas dengan tepat serta pemerintah harus mempunyai pertanggungjawaban ekonomi yang diamanahkan kepadanya dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat. (Purwaningrum et al., 2018)

E-budgeting

Penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) merupakan suatu sistem dalam penganggaran yang berbasis web atau aplikasi program sebagai fasilitas penganggaran untuk daerah (Rahman et al., 2019).

Disclosure

Disclosure memiliki makna tidak menutupi dengan kata lain tidak menyembunyikan, dalam konteks data disclosure dapat diartikan untuk memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan tanpa menutupi data originalnya. Data laporan keuangan yang diberikan harus bermanfaat karena merupakan sebuah tujuan dari disclosure atau pengungkapan. (Rusmita, 2019).

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undangundang dan peraturan yang berlaku, efisien dan efektif (Kusdiana, 2018).

Transparansi

Pemerintah dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) jika seluruh aktivitasnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penerapan SAP berbasis akrual ini dapat menaikkan akuntabilitas dan transparansi pada organisasi sektor publik karena merupakan pemikiran diterapkannya SAP berbasis akrual (D. A. D. Nasution & Ramadhan, 2018).

Pengaruh Penerapan E-Budgeting Terhadap Transparansi

Teori utama yang digunakan adalah teori keagenan, dalam penerapan *e-budgeting* di sini yaitu pegawai (*principal*) dipandang sebagai sebuah investasi bagi institusi, jika karyawan atau pegawai tersebut dikelola dengan perencanaan yang baik dan lebih profesional, maka

akan memberikan imbalan bagi institusi (agency) dalam bentuk produktivitas yang lebih besar, dan kemungkinan pencapaian tujuan institusi lebih efektif dan efisien (A. P. Nasution & Atika, 2019).

Dengan adanya teknologi informasi yang memadai pada organisasi pemerintah tingkat pusat maupun daerah, hal ini diharapkan dapat membuka peluang kepada masyarakat dalam mempermudah pengolahan informasi keuangan tingkat daerah secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi yang berupa *e-budgeting* ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah.

Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia 2019 oleh D. A. D. Nasution & Ramadhan, (2019). Dengan hasil bahwa implementasi sistem *e-budgeting* berpengaruh terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut terlalu luas karena dilakukan pada satu wilayah yaitu Indonesia. Untuk memvalidasi hasil riset tersebut, maka peneliti mengembangkan penelitian ini ke daerah pemerintahan lain yang lebih khusus yaitu dengan meneliti pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman serta bertujuan menilai sejauh mana penggunaan teknologi *e-budgeting* dalam menciptakan keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintahan.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat dibangun hipotesis:

H1: *E-budgeting* mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh *Disclosure* Laporan Keuangan Terhadap Transparansi

Teori utama yang digunakan adalah teori *stewardship*, dalam *disclosure* laporan keuangan ini Teori Stewardship menekankan pada dua hal penting yakni kewajiban agen (pemerintah) menjalankan amanah yang diberikan principal (masyarakat) dengan penuh tanggungjawab. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palu oleh Guasmin & Febrianti, (2019). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, penelitian tersebut masih terbatas dilakukan pada satu pemerintah daerah yaitu Kota Palu. Untuk memvalidasi hasil riset tersebut, maka peneliti mengembangkan penelitian ini ke daerah pemerintahan lain yang masih satu negara yaitu dengan meneliti pengaruh *disclosure* laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman serta bertujuan menilai sejauh mana tingkat penyajian laporan keuangan yang selama ini di publikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat dibangun hipotesis:

H2: *Disclosure* mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan dan bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya. Pengendalian internal adalah salah satu cara untuk mengukur, mengarahkan, serta mengawasi atas kegiatan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai, sehingga semakin baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah maka pencapaian tujuan pemerintah yang efektif dan efisien akan tercapai (E. W. Sari, 2017).

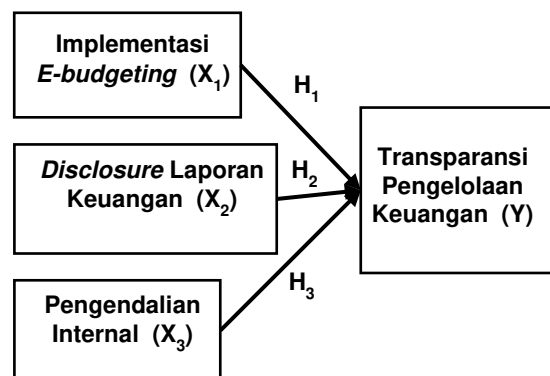
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah diwajibkan meningkatkan pengendalian internalnya, semakin baik pengendalian internal maka laporan keuangan daerah akan semakin akuntabel dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang transparan dapat memberikan pengaruh positif bagi pemerintah daerah yaitu memudahkan pemerintah daerah dalam mempublikasikan hasil kinerja keuangan, kegiatan, serta pengambilan keputusan selama periode berjalan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu dengan judul Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh R. P. Sari et al., (2020). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa kebijakan transparansi dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal. Namun, penelitian tersebut masih terbatas dilakukan pada satu pemerintah daerah

yaitu Kota Klaten. Untuk memvalidasi hasil riset tersebut, maka peneliti mengembangkan penelitian ini ke daerah pemerintahan lain yang masih satu negara yaitu dengan meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman serta bertujuan menilai sebaik apa pengendalian internal yang sudah di terapkan dalam pemerintahan .

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat dibangun hipotesis:

H3: Pengendalian Internal mempunyai pengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer, data primer data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Kuesioner tersebut diajukan kepada ASN yang bekerja pada pemerintahan SKPD Kabupaten Sleman. Dengan kriteria bekerja di bidang keuangan, berlatarbelakang pendidikan

minimal SMA/K, dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 dari 140 populasi pegawai ASN yang bekerja di SKPD Wilayah Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) yang nantinya diisi oleh responden di SKPD Kabupaten Sleman.

Menurut Sugiyono (2017) Variabel bebas (x) adalah variabel yang memengaruhi atau variabel yang menjadi penyebab hubungan sebab akibat atas variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: *E-budgeting*, *Disclosure*, dan Pengendalian Internal. Variabel yang dipengaruhi adalah variabel terikat (y), ini didefinisikan sebagai variabel yang menjadi akibat sebab adanya variabel bebas. Variabel terikat yang dipakai didalam penelitian ini adalah transparansi.

Menurut Sugiyono (2017) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Semua variable dalam penelitian ini diukur menggunakan: Skala Likert. Dengan skala penilaian (skor) 1 sampai dengan 5, kemudian dibuatkan daftar pertanyaan yang diambil dari kuesioner. Selanjutnya setiap pilihan jawaban ditandai dengan poin 1 untuk jawaban negatif dan poin 5 untuk jawaban positif .

Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reliabilitas datanya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabel yaitu apabila telah digunakan berkali-kali untuk mengukur suatu objek yang sama akan menghasilkan data yang serupa.

Analisis menggunakan alat *IBM SPSS* versi 25 dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain (Ghozali, 2016). Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain (Ghozali, 2016). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen.

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda melalui bantuan perangkat *SPSS* versi 25 adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Rumus 1. Rumus Analisis Regresi

Sumber: (Sugiyono, 2017)

Keterangan:

Y = Transparansi

α = Intercept/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X1 = Implementasi *E-budgeting*

X2 = *Disclosure* Laporan Keuangan

X3 = Pengendalian Internal

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent
Valid	Pria	22	31,4
	Wanita	48	68,6
	Total	70	100,0

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: *Data primer, diolah Maret 2021*

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah responden wanita (68,6%) lebih banyak dibandingkan pria dengan presentase (31,4%). Hal ini dikarenakan pada perekrutan pegawai dinas lebih banyak memilih pegawai wanita daripada pria.

Usia			
		Frequency	Percent
Valid	20-30 th	15	21,4
	30-40 th	10	14,3
	40-50 th	33	47,1
	Lebih dari 50 th	12	17,1
	Total	70	100,0

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berumur 40-50 tahun dengan presentase (47,1%), hal ini menunjukkan bahwa pegawai dinas masih lebih banyak didominasi orang dewasa yang berpengalaman.

Pendidikan Terakhir			
		Frequency	Percent
Valid	SMP/SMA	6	8,6
	Diploma	12	17,1
	D4/S1	41	58,6
	S2	11	15,7
	Total	70	100,0

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir D4/S1 dengan presentase (58,6%) hal ini menunjukkan bahwa pegawai dinas sudah cukup berkompeten tetapi masih perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.

Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal	Mean	0E-7
Parameter	Std.	1,09400359
$\sigma^{a,b}$	Deviation	
Most	Absolute	,115
Extreme	Positive	,115
Differences	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		,964
Asymp. Sig. (2-tailed)		,311
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar 0,311 yang berarti berada diatas 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi uji asumsi normalitas.

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	-,112	,911
SUMIE	-1,332	,187
SUMDLK	1,952	,055
SUMPI	-,501	,618
a. Dependent Variable: ABS_RES1		

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai Sig. SUMIE, SUMDLK, SUMPI berada diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SUMIE	,626	1,596
	SUMDLK	,423	2,363
	SUMPI	,418	2,395

a. Dependent Variable: SUMTPK

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas
Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance ketiga variabel bebas berada diatas 0,1 dan nilai VIF berada dibawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas atau uji asumsi multikolonieritas terpenuhi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1,087	1,942
	SUMIE	,223	,063
	SUMDLK	,200	,055
	SUMPI	,077	,048

a. Dependent Variable: SUMTPK

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier
Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan Tabel 7 diatas, nilai B dari ketiga variabel independen masing-masing yaitu: Implementasi E-budgeting adalah 0,223; Disclosure Laporan Keuangan adalah 0,200; dan Pengendalian Internal adalah 0,077 maka dapat disimpulkan bahwa:

Variabel implementasi e-budgeting berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Variabel disclosure laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Variabel pengendalian internal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 1,087 + 0,223X_1 + 0,200X_2 + 0,077X_3 + e$$

Uji Hipotesis

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	,560	,577
	SUMIE	3,559	,001
	SUMDLK	3,669	,000
	SUMPI	1,621	,110

a. Dependent Variable: SUMTPK

Tabel 8. Hasil Uji Parsial t
Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Hasil uji statistik t berdasarkan tabel 8 dapat digunakan untuk menentukan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hasil analisis regresi linier pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi pengelolaan keuangan

Uji statistik t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai p value dengan α (5%). Pengujian dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 25, variabel Implementasi e-budgeting (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar 3,559 > t_{tabel} 1,667 dengan signifikansi 0,001 < 0,05 atau α (5%) dan nilai koefisien (β) sebesar 0,223 sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara implementasi e-budgeting terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Hipotesis pertama (H1) didukung.

Hasil analisis regresi linier pengaruh *disclosure* laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Uji statistik t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai p value dengan α (5%). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *IBM SPSS 25*, variabel *disclosure* laporan keuangan (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar $3,669 > t_{tabel}$ 1,667 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ atau α (5%) dan nilai koefisien (β) sebesar 0,200 sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *disclosure* laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Hipotesis kedua (H2) didukung.

Hasil analisis regresi linier pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Uji statistik t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai p value dengan α (5%). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *IBM SPSS 25*, variabel pengendalian internal (X_3) memiliki t_{hitung} sebesar $1,621 < t_{tabel}$ 1,667 dengan signifikansi $0,110 > 0,05$ atau α (5%) dan nilai koefisien (β) sebesar 0,077 sehingga kesimpulannya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian internal terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Hipotesis ketiga (H3) tidak didukung.

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	40,296	,000 ^b
	Residual		
	Total		
a. Dependent Variable: SUMTPK			
b. Predictors: (Constant), SUMPI, SUMIE, SUMDLK			

Tabel 9. Hasil Uji Simultan F

Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} 40,296 $> F_{tabel}$ 2,74 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel implementasi *e-budgeting*, *disclosure*

laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,804 ^a	,647	,631
a. Predictors: (Constant), SUMPI, SUMIE, SUMDLK			
b. Dependent Variable: SUMTPK			

Tabel 10. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Sumber: Data primer, diolah Maret 2021

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,647 yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi *e-budgeting*, *disclosure* laporan keuangan, dan pengendalian internal dapat memberikan kontribusi sebesar 64,7% dalam memengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 35,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Karena nilainya yang mendekati 1 maka variabel-variabel bebas pada penelitian ini memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan

Teori *Stewardship* menekankan pada dua hal penting yakni kewajiban agen (pemerintah) menjalankan amanah yang diberikan principal (masyarakat) dengan penuh tanggung jawab. Sebagai upaya dalam memperkuat azas keterbukaan oleh pemerintah daerah. Azas keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan kebiasaan membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat (D. A. D. Nasution & Ramadhan, 2018). Dari uraian tersebut dapat

disimpulkan semakin baik implementasi *e-budgeting* yang dimiliki maka transparansi pengelolaan keuangan akan semakin baik, sebaliknya jika implementasi *e-budgeting* yang dimiliki rendah maka akan menurunkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance* yaitu dengan menggunakan laporan keuangan. Tentu dalam pembuatan laporan keuangan memerlukan sistem yang terintegrasi dengan baik dan pegawai yang berkompoten didalamnya. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang baik di bidangnya. *E-budgeting* merupakan alat sekaligus motor penggerak kualitas sebuah instansi organisasi. Implementasi *e-budgeting* yang baik akan mampu mengurangi tingkat kecurangan yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kegagalan implementasi *e-budgeting* akan mengakibatkan kecurangan yang berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan atau bahkan ketidaksesuaian dengan standar yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh D. A. D. Nasution & Ramadhan, (2019) yang meneliti pengaruh implementasi *e-budgeting* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada 32 pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan model regresi sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia.

Pengaruh *disclosure* laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan

Menurut Rusmita (2019) Penyajian laporan keuangan merupakan pengungkapan atas informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan secara relevan, jujur dan terbuka terhadap publik. Penyajian dan pengungkapan

laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah. Dalam mengelola keuangan publik tuntutan pertanggungjawaban di organisasi sektor publik keterbukaan dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.

Untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance* yaitu dengan menggunakan laporan keuangan. Tentu dalam pengungkapan laporan keuangan memerlukan berbagai kriteria yang harus terpenuhi. Handal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan karakteristik yang mendasari laporan keuangan yang berkualitas. *Disclosure* merupakan metode sekaligus standar penilai kualitas sebuah laporan keuangan instansi organisasi. *Disclosure* yang baik akan mampu mengurangi tingkat kecurangan yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kegagalan *disclosure* akan mengakibatkan menurunnya kualitas yang berdampak pada menurunnya keyakinan pihak pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Guasmin & Febrianti, (2019) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pengelolaan keuangan

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal kendala pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang undang dan

peraturan yang berlaku, efisien dan efektif (Kusdiana, 2018). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan semakin baik pengendalian internal yang dimiliki maka transparansi pengelolaan keuangan akan semakin baik, sebaliknya jika pengendalian internal yang dimiliki kurang baik maka akan menurunkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan.

Namun tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R. P. Sari et al., (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan transparansi dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal. Namun temuan dalam penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal semacam ini terjadi karena kemungkinan sistem pengendalian internal dalam organisasi tidak dilaksanakan dengan baik dan optimal oleh SKPD kabupaten Sleman, sehingga kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Semakin baik implementasi *e-budgeting* yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadikan pengelolaan keuangan daerah semakin membaik, hal ini dikarenakan melalui peningkatan integrasi seperti sistem online membuat pegawai dapat memahami logika akuntansi dengan baik dan dapat membuat laporan keuangan dapat dipahami oleh semua pihak.

Disclosure laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Disclosure* yang baik akan mampu mengurangi tingkat kecurangan yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kegagalan *disclosure* akan mengakibatkan menurunnya kualitas yang berdampak pada menurunnya keyakinan pihak

pengguna laporan keuangan. Hal ini mengartikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik pasti melakukan pengungkapan secara lengkap dan memenuhi kriteria sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, membuat para pegawai selalu merasa diawasi dan waspada terhadap pembuatan laporan keuangan. Namun dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa SKPD kabupaten Sleman gagal dalam menerapkan pengendalian internal untuk organisasinya. Kegagalan semacam ini terjadi karena kemungkinan sistem pengendalian internal dalam organisasi tidak dilaksanakan dengan baik dan optimal oleh SKPD kabupaten Sleman, sehingga kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan secara efektif.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencantumkan implikasi sebagai berikut.

Penelitian ini bermanfaat bagi pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dalam menunjukkan peran penting implementasi *e-budgeting* untuk mendorong transparansi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* memengaruhi transparansi keuangan. Sedangkan pengendalian internal tidak memengaruhi transparansi keuangan. Hal ini menunjukkan dalam meningkatkan transparansi lebih baik memaksimalkan implementasi *e-budgeting* daripada meningkatkan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencantumkan keterbatasan sebagai berikut.

Alur birokrasi dari setiap SKPD berbeda-beda yang menyebabkan kesulitan dalam proses pengumpulan data. Tingkat kejujuran responden yang

rendah dalam mengisi kuesioner dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mencari sampel yang relevan. Dengan cara memperluas penelitian, tidak hanya pada SKPD yang di Kabupaten Sleman. Selanjutnya disarankan menggunakan pengembangan variabel independent lain yang lebih terukur dan tajam. Bisa dengan menambahkan Kompetensi SDM, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Tekanan Eksternal. Dengan cara memperbanyak referensi, tidak hanya sumber lokal mungkin menggunakan kajian internasional.

REFERENCES

- Ar, R., Maryadi, & Sugeng Waluyo, H. (2020). Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan Bappeda Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pinrang. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020*, 1, 92–105.
- Dika Kurniawan¹, S. R. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2018). *E-Proceeding Of Management*, 6(1), 1–10.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23* (Viii). Universitas Diponegoro.
- Guasmin, & Febrianti, D. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palu. *Jurnal Sinar Manajemen*, 6(2), 129–134.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Insani, N. G. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi. *Repository Ugm*.
- Kusdiana, W. P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung). *Repository Unpas*.
- Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementasi E-Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13. [Http://Jurnal.Pancabudi.Ac.Id/Index.Php/Akuntansibisnisdanpublik/Article/View/454](http://Jurnal.Pancabudi.Ac.Id/Index.Php/Akuntansibisnisdanpublik/Article/View/454)
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2018). Analisis Pengaruh Sdm, Insentif Dan Sarana Pendukung Terhadap Implementasi Sap Berbasis Akrua Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 208–219.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, July, 669. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P26>
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Technobiz: International Journal Of Business*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.33365/Tb.V3i2.453>
- Nurhayati. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa

- Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 21–29.
- Pancaningrum, I. G. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Pemanfaatan E-Sbn Ritel Online Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Repository Ust*.
- Purwaningrum, S., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo. *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 67–77.
- Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi, R. (2019). Evaluation Of E-Budgeting Implementation In Provincial Government Of Dki Jakarta Using Cipp Model Approach. *Journal Of Accounting And Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001110>
- Rusmita, T. (2019). Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Lampung Selatan. *Repository UI*.
- Sabriani, A. A. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgrri Kediri Vol. 5 No. 2, Juli2020*, 5(2), 14–23.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jomfekom*, 4(1), 843–857.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sugiyono. (2017). *Penelitian Bisnis*. Cv. Alfa Beta.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan* (Ruslan (Ed.)). Ugm Press.